



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

RENCANA KERJA 2022



TAHUN
2021

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar belakang.....	3
1.1 Landasan Hukum.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
Maksud.....	5
Tujuan 5	
1.3 Sistematika penulisan	6
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	9
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	11
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah	14
3.3 Program dan Kegiatan.....	15
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
BAB 5 PENUTUP	28

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Khusus untuk tahun 2022 Renja Dinas Perindag ESDM merupakan penggabungan dari proses penyusunan Renja di masing-masing Perangkat Daerah sebelum penggabungan yaitu Dinas Perindag dan Dinas ESDM Prov. Kalbar karena proses penggabungannya di tengah tahun yang telah melalui proses jadwal penyusunan Renja.

Dokumen renja ini sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan dengan tujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindag ESDM Tahun 2018 – 2023, dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran¹ indikatif.

Secara umum di dalam rencana kerja ini terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu Urusan ESDM, Perdagangan, dan Perindustrian. Dimana untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan ketiga urusan tersebut di dukung dengan 13 program yang dijabarkan kedalam total terdapat 81 sub kegiatan. Utamanya untuk urusan perdagangan, didukung oleh keberadaan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) yang melaksanakan 2 progam.

Dengan tersusunnya rencana kerja Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar di masa peralihan terkait perubahan perda SOPD Prov Kalbar dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan proses penyusunan anggaran sebagai bagian dalam penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022.

Pontianak, Agustus 2021
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat



DR. Syarif Kamaruzaman, M.Si

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejalan dengan perkembangan kebijakan praktek pelaksanaan pembangunan seperti lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak adanya penyesuaian tugas dan fungsi pada beberapa perangkat daerah juga berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berdampak pada penarikan kewenangan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Khusus untuk tahun 2022 Renja Dinas Perindag ESDM merupakan penggabungan dari proses penyusunan Renja di masing-masing Perangkat Daerah sebelum penggabungan yaitu Dinas Perindag dan Dinas ESDM Prov. Kalbar karena proses penggabungannya di tengah tahun yang telah melalui proses jadwal penyusunan Renja.

1.1 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 yang kemudian diubah dalam Pergub Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. Pedoman dan dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.
- b. Acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

Tujuan

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindag ESDM Tahun 2019 – 2023, dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran indikatif.
- b. Menyelaraskan program kerja Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dengan program nasional di bidang perindustrian dan perdagangan, program kabupaten/ kota, isu – isu strategis, usulan – usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang perindustrian dan perdagangan.

1.3 Sistematika penulisan

Dokumen Renja 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4. Penelahaan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Urusan energi dan Sumber Daya Mineral

Belum optimalnya informasi potensi dan sumberdaya mineral dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumberdaya mineral.

Masih belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dimana di dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) titik cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km², Cekungan air tanah Sambas (3.178 km²), cekungan air tanah Singkawang (728 km²), cekungan air tanah Pontianak (22.620 km²), cekungan air tanah Sintang (24,74 km²), cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km²) dan Palangkaraya-Banjarmasin (95.980 km²).

Masih belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam peningkatan nilai tambah dan kontribusi penerimaan iuran tambang terhadap PDRB dan masih banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain (Pemanfaatan lahan ganda).

Kondisi rasio elektrifikasi yang belum maksimal di Kalimantan Barat bisa disebabkan oleh faktor masih banyaknya potensi energi baru terbarukan tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum dapat meningkatkan rasio elektrifikasi.

Rendahnya persentase kontribusi bauran energi berbasis EBT karena banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar minyak, masih kurangnya sosialisasi hemat energi dan air kepada masyarakat dan instansi pemerintahan, masih kurangnya regulasi daerah tentang pengelolaan energi dan sosialisasi terhadap regulasi terkait, belum optimalnya pengembangan dan

pengelolaan data mengenai potensi EBT, masih terdapat beberapa fasilitas EBT terbangun yang tidak dirawat dengan baik sehingga mengalami kerusakan, belum optimalnya pendataan terhadap penggunaan Biofuel yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan listriknya, dan belum terdatanya informasi mengenai penurunan gas rumah kaca (GRK).

Perdagangan

1. Struktur ekspor Kalimantan Barat yang masih didominasi oleh tiga komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang, dan produk perikanan (diatas 80% nilai total ekspor total Kalimantan Barat), sehingga perkembangan nilai ekspor Kalimantan Barat masih sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditi tersebut di pasar dunia.
2. Sistem logistik daerah yang tidak efektif dan efisien sehingga menyebabkan rentannya kelangkaan barang dan fluktuasi harga bahan pokok dan bahan strategis masyarakat.
3. Tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyaknya peredaran barang dan jasa baik dari dalam maupun luar daerah sehingga diperlukannya peningkatan perlindungan konsumen agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat.
4. Permasalahan utamanya masyarakat Kalbar berdasarkan hasil survey tersebut yang dilakukan Kemendag RI Bersama IPB Bogor adalah masih banyak yang masyarakat Kalbar yang belum mengetahui regulasi terkait Perlindungan Konsumen serta Lembaga – Lembaga perlindungan konsumen. Selain itu juga masih rendahnya perilaku Komplain Masyarakat Kalbar atas produk konsumsi yang tidak sesuai yang diterima serta penggunaan produk lokal dan dalam negeri.

Perindustrian

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditi utama Kalbar baik Karet, Kelapa Sawit, maupun Bauksit dimana saat ini masih terpaku pada produk tertentu (setengah jadi) sehingga perlu upaya pengembangan lebih lanjut yang dibarengi dengan perluasan pangsa pasar, peningkatan inovasi, serta efisiensi proses produksi.
2. Minimnya sarana dan sarana dasar (kelistrikan, air bersih, jalan, dsb) dalam rangka mendukung investasi sektor industri Kalbar. Pentingnya realisasi

- pembangunan perwilayahan industri baik Kawasan Industri maupun Sentra Industri akan menawarkan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kalbar.
3. Minimnya kompetensi SDM Industri baik Industri besar maupun IKM yang dapat mengeksploitasi SDA yang dimiliki oleh daerah. Peningkatan SDM Industri merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi SDM Industri perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kedepannya.
 4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini baik dari sisi ketersediaan akses internet di daerah maupun pengetahuan pelaku usaha IKM yang membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengatasinya. Minimnya koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) diharapkan dapat segera diperbaiki agar dapat meningkatkan peran IKM dalam pengembangan industri Kalbar

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 dengan target-target sasaran pembangunan daerah seperti pada matrik berikut:

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1	Mewujudkan percepatan pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah serta perbatasan	Indeks infrastruktur	68,29
2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	BB
			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB
3	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusa (IPM)	70,29
4	Mewujudkan masyarakat sejahtera	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui pengurangan	Pertumbuhan Ekonomi	4,71-5,46
			Indeks Gini	0,323-0,321
			Desa Mandiri	319

		kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka	5.53-4,29
			Angka Kemiskinan	7.31-7,03
5	Mewujudkan masyarakat yang tertib	meningkatnya ketentaraman dan ketertiban masyarakat	Konflik sosial	0
6	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66,70

Adapun prioritas pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindag ESDM yaitu:

Misi 1	1. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (menerangi desa gelap gulita)
Misi 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pelabuhan Kijing untuk meningkatkan ekspor 2. Mempercepat Hilirisasi Industri 3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Perbatasan 4. Meningkatkan ekspor melalui PLBN 5. Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan berorientasi ekspor

Percepatan hilirisasi industri menjadi tugas amat berat bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bukan hanya menjadi beban sektor industri namun juga melibatkan dukungan jaringan infrastruktur yang layak, sumber energi baik itu berupa listrik maupun gas yang mencukupi untuk industri serta ketersediaan air bersih.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Urusan ESDM

Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) cekungan air tanah yaitu :

	Nama	luas
1.	Cekungan Air Tanah Paloh	561 Km ²
2.	Cekungan Air Tanah Sambas	3.178 Km ²
3.	Cekungan Air Tanah Singkawang	728 Km ²
4.	Cekungan Air Tanah Sintang	24,74 Km ²
5	Cekungan Air Tanah Kapuas Hulu	7.107 Km ²
6	Cekungan Air Tanah Palangka Raya-Banjarmasin	95.980 Km ²

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Penetapan tersebut didasarkan apda kriteria:

- a. Mempunyai batas hidrogeologik yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulis air tanah
- b. Mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
- c. Memiliki sistem akuifer

Penetapan melalui Peraturan Menteri ESDM tersebut menjadi acuan bagi Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya dalam penetapan zona konservasi air tanah, pemakaian air tanah, pengusaha air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pertambangan dan penggalian

Kementerian ESDM dalam dokumen rencana strategisnya telah menargetkan dalam kurun waktu 2020-2024 telah terbangun setidaknya 8 (delapan) buah smelter pengolahan Bauksit di Kalimantan Barat. Dengan adanya smelter ini akan didapatkan nilai tambah yang sangat signifikan baik secara nasional maupun wilayah Kalbar.

Dampak dari terbangunnya smelter ini bukan hanya dirasakan secara ekonomi namun juga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan.

Berikut perkembangan pembangunan smelter di Kalimantan Barat

No	PERUSAHAAN	KEMAJUAN
1.	PT Indonesia Chemical Alumina (ICA)	100 %
2.	PT Well Harvest Winning (WHW)	100 %
3.	PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM)	41.7 %
4.	PT Laman Mining	20.36 %
5.	PT Kalbar Bumi Perkasa	35.17 %
6.	PT Borneo Alumina Perkasa	16.79 %
7.	PT WHWAR (Expansion)	55.05%

*sumber : Renstra Kemen ESDM 2020-2024

Masih kaitannya dengan pertambangan di dalam Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang kegiatannya sepenuhnya bertanggung jawab kepada Menteri. Tentunya daerah patut mengapresiasi hal ini sebagai bagian dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup.

Energi Terbarukan

Sebagai pelaksanaan terhadap Perpres 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK Kementerian ESDM telah mencanangkan kegiatan mitigasi sektor energi dimana untuk sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) mendorong pembangunan PLTP, PLTS, PLTM, PLTMH, PLTBiomassa, Pemanfaatan Biogas, Pemanfaatan Biodiesel, serta Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Ketenagalistrikan

Arah kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Kementerian ESDM dalam memperkuat infrastuktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sektor energi dan ketenagalistrikan yaitu diversifikasi energi dan ketenagalistrikan, peningkatan efisiensi energi dan tenaga listrik, serta penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik.

Pasokan tenaga listrik dilakukan dengan antara lain penambahan pembangkit listrik, penambahan transmisi, penambahan gardu induk, pengadaan sarana distribusi tenaga listrik, listrik pedesaan, rasio elektrifikasi, peningkatan konsumsi per kapita, serta susut jaringan.

Perdagangan

Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri dan meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri menjadi misi yang diemban Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai adalah;

1. Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa untuk mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Dilaksanakan melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, optimalisasi peran perdagangan berjangka komoditi, sistem resi Gudang dan pasar lelang komoditas.

Perindustrian

Kementerian Perindustrian telah menyusun 6 (enam) arah kebijakan dimana 4 (empat) diantaranya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Empat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Pengembangan sumber daya industri yang meliputi antara lain pembangunan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi.
2. Pengembangan sarana prasarana industri yang meliputi pengembangan system informasi industri nasional (SIINAS)
3. Pengembangan perwilayahan industri yang meliputi antara lain pengembangan Kawasan Industri, pembangunan atau revitalisasi Sentra IKM (SIKIM)
4. Pemberdayaan Industri yang meliputi antara lain pengembangan kebijakan industri kecil menengah dan industri hijau.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan rencana Kerja tahun 2022 sebagaimana di matrik dibawah yaitu mengelaborasi Tujuan yang ditetapkan pada RPJMD guna mewujudkan misi pembangunan Kepala Gubernur.

Terdapat dua tujuan Renstra yang kemudian menjadi tujuan tahunan dalam di dalam renja yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastuktur serta pasokan tenaga listrik wilayah Kalbar
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Perindustrian serta Pertambangan dan penggalian

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis dinas Perindag ESDM yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah Desa Berlistrik
2. meningkatnya nilai transaksi perdagangan
3. meningkatnya nilai ekspor sektor industri
4. Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari Pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara

Dengan target indikator kinerja sebagaimana tertera dalam matrik dibawah;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		
			2021	2022	2023
MISI 1. MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR					
RPJMD Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah serta perbatasan	Sasaran RPJMD Ketersediaan infrastuktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkatkan	Rasio Elektrifikasi (<i>Persen</i>)	89	91	93
		Daya Mampu Listrik di Kalimantan Barat (Mega Watt)	1093	1193	1296
RENSTRA Meningkatnya ketersediaan infrastuktur serta pasokan tenaga listrik wilayah Kalbar	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik non PLN	kapasitas pembangkit listrik non PLN	675	700	725
MISI 4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA					
RPJMD Meningkatnya perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (<i>Persen</i>)	3,99 - 5,53	4,20 – 5,76	4,51 - 5,99

masyarakat yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri (<i>Persen</i>)	7,61 - 7,67	7,74 - 7,75	7,83 - 7,86
		Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (<i>Persen</i>)	3,10 – 4,69	3,26 – 4,88	3,45 – 5,07
RENSTRA Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan. Perindustrian serta Pertambangan dan penggalian	meningkatnya nilai transaksi perdagangan	nilai transaksi perdagangan (US\$ juta)	1250	1350	1350
	meningkatnya nilai ekspor sektor industri	persentase nilai ekspor industri terhadap total ekspor kalbar	70	70	70
	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan Harga Konstan	PDRB sektor Perdagangan Harga Konstan	8236.34 juta	8826.13 juta	9415.92 juta

3.3 Program dan Kegiatan

Program-program yang direncanakan pada tahun anggaran 2021/2022 yaitu Program yang bersifat program dukungan kelembagaan atau manajemen dan Program-program pada urusan Perdagangan, Urusan Industri serta ESDM.

Program-program tersebut adalah :

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
- II URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
 - 1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - 2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - 3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - 4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- III URUSAN PERDAGANGAN**
 - 1. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - 4. Program Pengembangan Ekspor
 - 5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- III URUSAN INDUSTRI**
 - 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Untuk tahun anggaran 2022 diusulkan sebanyak 13 program termasuk program penunjang sebagaimana tersebut di atas, yang dijabarkan ke dalam 31 program serta 81 kegiatan. Sementara dukungan UP PSMB terdiri dari 2 Program yaitu Program Penunjang dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan serta pendanaan yang disusun untuk tahun 2022, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindag ESDM Tahun 2013-2018.

Fokus kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai mana pada tabel berikut:

	URUSAN ESDM	LOKASI
1	PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK GRATIS	BENGKAYANG
2	PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN KETENAGALISTRIKAN	PONTIANAK
3	PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN AIR TANAH	PONTIANAK
4	PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN	PONTIANAK
5	PENYUSUNAN DOKUMEN FS/DED PLTMH	KAPUAS HULU, SINTANG
6	PENYUSUNAN DOKUMEN FS/DED PLTS	MELAWI, KETAPANG
7	REVITALISASI PLTS	KAPUAS HULU, MELAWI, SINTANG, LANDAK

	URUSAN PERDAGANGAN	LOKASI
1	FASILITASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL EKSPOR (SKA)	PONTIANAK
2	PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR (PARTISIPASI PADA TRADE EXPO INTERNATIONAL) / FASILITASI EKSPOR PRODUK UMKM DAERAH	TANGERANG
3	PROMOSI DAGANG	PLBN
4	PEMBINAAN PELAKU USAHA EKSPOR (UMKM)	PONTIANAK
5	KLINIK KEMASAN BAGI UMKM BERORIENTASI EKSPOR	PONTIANAK
6	PEMANTAUAN HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING DALAM RANGKA STABILISASI HARGA	KALIMANTAN BARAT
7	PASAR MURAH DITUJUKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM MENGHADAPI HARI BESAR KEAGAMAAN	LANDAK, SEKADAU, SINGKAWANG, KETAPANG, BENGKAYANG
8	PROMOSI PRODUK LOKAL	PONTIANAK, SAMBAS, KETAPANG
9	PEMBERDAYAAN KONSUMEN/FASILITASI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)	KETAPANG, SINTANG, PONTIANAK, SINGKAWANG
11	PELAYANAN PENGUJIAN MUTU BARANG (UPSMB) / PAD	KALIMANTAN BARAT

	URUSAN PERINDUSTRIAN	LOKASI
1	EVALUASI PELAKSANAAN PERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN KABUPATEN (RPIP DAN RPIK)	PONTIANAK
2	FASILITASI PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (SIKIM) DAN KAWASAN INDUSTRI (KI)	SAMBAS, LANDAK, SANGGAU, KETAPANG
3	PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI (SDMI) / PEMBINA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PONTIANAK
4	FASILITASI KERJA SAMA PEMASARAN PRODUK-PRODUK IKM	PONTIANAK, KUBU RAYA, KETAPANG. LANDAK, SINGKAWANG
5	PEMBINAAN PENERAPAN STANDARDISASI INDUSTRI BAGI IKM	PONTIANAK, SINGKAWANG, SAMBAS
6	PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN IKM UNGGULAN	SINGKAWANG
7	PENUMBUHAN WIRUSAHA BARU	KUBU RAYA, SEKADAU
8	PENINGKATAN KUALITAS PRODUK IKM (BIMTEK)	SANGGAU, SINTANG
9	FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL, IJIN EDAR BPOM, HAKI BAGI IKM	PONTIANAK
10	PENGAWASAN PELAKSANAAN IJIN USAHA INDUSTRI	KALIMANTAN BARAT
11	UPDATING DATA DAN INFORMASI INDUSTRI / SIIDA / SIINAS	PONTIANAK
12	PEMBINAAN PENYUSUNAN RPIK	KAYONG UTARA

Keterkaitan antara Indikator kinerja utama dan program dapat dilihat dari tabel berikut

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2022	URUSAN BID PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2022	
						target	Rp (juta)
						1	2
31				Energi dan Sumber Daya Mineral			
31.1	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik non PLN	kapasitas pembangkit listrik non PLN	700	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Penyedia dan Pemanfaat Tenaga Listrik Non PLN Yang Memiliki Perizinan Ketenagalistrikan (%)	59.80	3600
					Persentase Energi Baru Terbarukan dalam Pembangkitan Energi Listrik Kalimantan Barat	9 %	
					Persentase Desa Berlistrik	87 %	

31.2				Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah penurunan Emisi GRK di sektor energi (Ton CO2 Eq)	12	284
31.3	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan Harga Konstan	PDRB sektor Perdagangan Harga Konstan	8826.13 juta	Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara	Total Penerimaan PNBK sektor Pertambangan wilayah Kalbar (Milyar Rupiah)	120	707
					Persentase Luas Wilayah yang telah direklamasi oleh pemegang IUP	40	
31.4				Program Pengelolaan Kegeologian	Zona Konservasi Air Tanah Yang ditetapkan	1 dok	1297
32				Perdagangan			
32.3	meningkatnya nilai transaksi perdagangan	nilai transaksi perdagangan (US\$ juta)	1350	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi	100 %	50
32.4				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peta Spasial Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	50 %	100
					kebijakan peningkatan sarana distribusi perdagangan (laporan)	1	
32.5				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi Bahan Makanan (%)	3.5	1500
32.6				Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kalbar (US\$ Juta)	1100	800

32.7				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	41	955
					persentase kabupaten/kota yang terlayani perlindungan konsumen	29	
					Jumlah ruang lingkup layanan (lab pengujian)	4	
32.8				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah perjanjian kerjasama antar daerah (Provinsi)	2	150
					pengelolaan sistem Informasi dan promosi Perdagangan	1 sistem	
33				Perindustrian			
33.1	meningkatnya nilai ekspor sektor industri	persentase nilai ekspor industri terhadap total ekspor kalbar	70	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	jumlah regulasi perencanaan industri yang disusun kabupaten dan provinsi	8	3410
					persentase kontribusi industri unggulan (RPIP) kalbar terhadap total kontribusi industri pengolahan pada pdrb	90.2	
33.2				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	laporan pengendalian ijin usaha industri	1	180
33.3				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	sistem data dan informasi yang dikelola	1	350

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta)
		2022
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.343
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.000
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	298
	3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	30
III.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	57
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12
	2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20
	3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10
	4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130
	3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55
	4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50
	5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25
	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	20
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300
	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60
	10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279
	1. Pengadaan Mebel	55
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174
	3. Pengadaan sarana prasarana Gedung kantor	50
VII	Penyediaan Jas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.204

	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,0
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	585
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.566
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		787
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130
	3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	135
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75
	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN

	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta)
			2022
I.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi		1.035
	1	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1.035
II.	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air tanah		239,1
	1.	penyusunan rekomendasi layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, ijin penggalian, ijin pemakaian, dan ijin pengusahaan air tanah	106,4
	2.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	132,7
III.	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		130
	1.	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	130

II. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATU BARA

	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu (Rp. juta)
		2022
I.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	252.5
	1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Mineral Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	196,7
	2. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	55,8
II.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	242.7
	1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	189.8
	2. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	52,9
III	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	240
	1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batu dalam WPR	240
IV	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	54
	1. Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	54

III. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta)
		2022
I.	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	94
	1. Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dengan kapasitas pengguna dibawah 10.000 T/Tahun di Kabupaten Se-Kalimantan Barat	94
II.	pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	180,7
	1. Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang menerapkan Konservasi Energi	63,7
	2. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	117

IV. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta)
		2022
I.	Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	618,7
	1. Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi	299
	2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	319,7
II.	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	139,1
	1. Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri	97,7
	2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	41,4
III	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	5.505,6
	1. Pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	108,1
	2. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi sasaran pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	172,5
	3. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	5.225

URUSAN PERDAGANGAN

I. PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50
1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	50

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	120
1	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	120

III. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	620
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	620
II	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.200
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	200
2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.000

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang	734,6
1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	300
2	Pameran Dagang Lokal	53,4
3	Misi Dagang bagi Produk Unggulan	46,2
4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	250
5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	85

V. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	70
1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	70
II.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa di seluruh daerah	70
1	Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar	70

VI. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	75
1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	75
II	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	75
1	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	75

URUSAN PERINDUSTRIAN

I. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.245
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	300
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	250
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	300
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	150
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	600
6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	60

II. PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI

KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta) 2022
I	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin	180
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	60
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam	120

III. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta)
		2022
I	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	350
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	150
2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui	50
3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	150

UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (UPT PSMB)

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu (Rp. juta)
		2022
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	20
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	158
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8
2.	Pelaksanaan penatausahaan keuangan	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	35
4.	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	15
III.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	40
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20
2.	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	20
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119
1.	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	20
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44
5.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.5
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.5
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	19
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.140

	1.	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-
	2.	Pengadaan Mebel	35
	3.	Pengadaan Aset tak berwujud	25
	4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650
	5.	Pengadaan sarana prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	215
	6.	Pengadaan sarana prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	215
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		362
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132
VIII.	Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		896
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	56
	2.	Pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	175
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	200
	5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175

IV. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Pagu (juta)
			2022
I.	Pelaksanaan Pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota		815
	1	Verifikasi mutu produk	80
	2	Pengembangan layanan pengujian	315
	3	Pengembangan layanan sertifikasi	200
	4	Pengembangan layanan kalibrasi	220

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Renja 2022) merupakan bagian yang tidak terpisahkan Rencana Strategis Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023. Renja 2022 Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalbar disusun berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang di Kalbar, pencapaian target RPJMD Kalbar 2019-2023 dan Program/Kegiatan yang direncanakan benar-benar memiliki keluaran yang cepat dan dibutuhkan masyarakat harus menjadi prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Uniknya penyusunan renja ini berdasarkan renstra Perindag ESDM yang baru, terbentuk di tengah-tengah tahun anggaran berjalan di mana proses penyusunan rancangan awal renja serta proses musrenbang telah selesai. Sehingga renja ini akan halnya dokumen renstra nya merupakan kompilasi dari apa yang telah di susun oleh Perangkat daerah lama yaitu Dinas Perindag dan Dinas ESDM.

Tentunya di dalam dokumen renja ini berisi uraian target kinerja serta target pembiayaan untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian terjadinya pergeseran pendanaan kemungkinan besar tidak dapat dihindari mengingat proses penyusunan anggaran merupakan proses sangat dinamis yang kadang terjadi tarik ulur pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan.

Sebagai penutup Dokumen renja ini disusun sebagai pegangan bagi segenap pengampu program kegiatan pada Dinas Perindag ESDM untuk Penyusunan RKA yang menjadi cikal bakal penyusunan APBD.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN